

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) I DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD TENTANG SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. PELAKSANAAN

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Maret 2025
Pukul : 12.30 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri
Acara : *Focus Group Discussion* I dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan
Draf Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD tentang Pengelolaan Sistim
Pemerintahan Berbasis Elektronik

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Gimanto, S.H.
Jabatan: Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD

1. Gimanto, S.H.	Ketua Bapemperda DPRD
2. Arum Subekti	Wakil Ketua Bapemperda DPRD
3. Bambang Sadriyanto	Anggota Bapemperda DPRD
4. Supriyanto	Anggota Bapemperda DPRD
5. Catur Winarko	Anggota Bapemperda DPRD
6. Titik Sugiyarti, S.Sos	Anggota Bapemperda DPRD
7. Ari Sumantri	Anggota Bapemperda DPRD
8. Indah Retnowati	Anggota Bapemperda DPRD
9. Reni Toriliana, A.Md	Anggota Bapemperda DPRD
10. Wawan Arifianto, S.T.	Anggota Bapemperda DPRD
11. Iskandar, Amd	Anggota Bapemperda DPRD

B. Eksekutif

1. Mawan Tri Hananto, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2. Sigit Prastopo	Kabid Kearsipan
3. Totok Sugiyarto	Kabag. Organisasi Setda Kab. Wonogiri
4. Heru Nur Iswanto	Kadis Kominfo
5. Sri Rahayu	Dinas Kominfo
6. Tarjo, S.Sos., M.Si	Dinas Kominfo
7. Ari Wibowo	Dinas Kominfo
8. Alfian nanung Pradana, S.H.	Bagian Hukum
9. Staf Setwan	

C. Tenaga Ahli Akademisi

1. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.H	Tenaga Ahli UNNES
------------------------------------	-------------------

2. Eliska Desi Astuti, S.H
3. Aziz Widhi nugraha, S.H., M.H

Tenaga Ahli UNNES
Tenaga Ahli UNNES

IV. JALANNYA RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri, Gimanto, S.H. dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Dewasa ini Perkembangan Teknologi Informasi begitu kencang. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi terkait perangkat-perangkat elektronik seperti *Smartphone* dan komputer;
 2. Begitu juga yang terjadi pada unsur Pemerintahan juga dituntut untuk lebih efisien dan lebih cepat didukung dengan perangkat dan Sumber Daya Manusia yang lebih melek Teknologi. Mulai dari Tingkat Nasional sampai ke Tingkat Kabupaten harus memulai langkah terpadu dalam pencapaian Program Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 3. Konsep SPBE sendiri memang lebih menyeluruh dimulai dari Aspek Perencanaan yaitu dengan cara mengharmonisasikan Peraturan perundangan sampai dengan integrasi dengan berbagai layanan **e-government** terkait SAKIP guna mendukung RPJMD dan nantinya mengarah kepada Pemerintahan yang Inovatif dan berdaya saing;
 4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri bermaksud melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Dan Draf Raperda Inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan didampingi Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi Dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES.
 5. Adapun konsep pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda diantaranya :
 - a. FGD I dilaksanakan di kantor DPRD.
 - b. **Public Hearing**, dilaksanakan di Kantor DPRD
 - c. Kunjungan Kerja Luar Daerah.
 - d. FGD II dilaksanakan di Kantor DPRD.
3. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi Dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan :
 - a. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.H
 - 1) Tahapan Revolusi Industri Global
 - Dimulai dari penemuan mesin uap sampai dengan kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan *wireless* dan *big data* secara masif;
 - Penggunaan *Mobile Internet* sampai pada *cloud* penyimpanan yang *paperless*;
 - Sampai pada pembentukan E-Pemerintahan yang didukung dengan segala infrastrukturnya dalam era transformasi digital.
 - 2) Sistim Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) diatur dalam pepres nomor 95 tahun 2018 dan Perpres nomor 132 tahun 2022.
 - 3) Arahan Strategis SPBE SUMMIT 2023

- a) Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat (*Citizen centric*).
- b) Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi *Digital Transformation Agent* (DTA) dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital.
- c) Moratorium Pembangunan Aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
- d) Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah.
- e) Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik Layanan Digital.
- f) Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE.

4) Tantangan dalam Implementasi Perpres SPBE

- a) Kerangka Kelembagaan
 - Tim Koordinasi Nasional
 - Tim Koordinasi Instansi Pusat
 - Tim Koordinasi Pemda
- b) Kerangka Regulasi
 - Harmonisasi dengan peraturan perundangan sektoral
- c) Kerangka Pembiayaan
 - Konsolidasi perencanaan dan penganggaran SPBE
- d) Kerangka *e-planning* dan *e-budgeting*
 - Integrasi dengan system lain: e-proc, e-monev, dst
 - Komunikasi dengan system lain: Simral, SIMDA, dll

5) Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam konteks perencanaan dan penganggaran SPBE

- a) Membahas rancangan program dan kegiatan SPBE secara holistik dan integratif dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD;
- b) Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat;
- c) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Peraturan Perundang-Undangan Terbaru.

6) Arah Kebijakan

Sesuai *Government Affairs* (UU 23 tahun 2014) adalah:

- Wajib Pelayanan Dasar;
- Wajib Non-Pelayanan Dasar;
- Pilihan;
- Adanya Platform kebijakan berbasis kondisi dan budaya daerah.

4. Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan :

a. Bapak Heru Nur (Kadis. Kominfo)

- 1) Mari pembahasannya diperluas sampai kepada smart city dll;

- 2) Untuk FGD 2 mohon dihadirkan Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Bapperida, dan Kepala BPKD;
 - 3) Elektronifikasi Pemerintah Daerah;
 - 4) Menuju satu Data Indonesia;
 - 5) Meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia;
 - 6) Sampai dengan Fasilitasi Elektronisasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- b. Bapak Totok (Kabag Organisasi)
- 1) Inovasi kita sudah mulai dijalankan dengan integrasi sistem dengan SAKIP.
 - 1) Bupati Wonogiri, terkait sumbu pantek semoga bisa dimasukkan.
- c. Ibu Ristina (UNNES)
- 1) Penggunaan Layanan Digital untuk layanan publik perlu banyak ditingkatkan
 - 2) Manajemen dan juga SDM masih perlu ditingkatkan lagi;
 - 3) Pada Pembahasan selanjutnya (*Public Hearing*) kita akan sajikan konten terkait konsep naskah akademiknya sehingga akan lebih memfokuskan pembahasan perubahan raperda ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan :

1. Tenaga Ahli Akademisi akan melakukan analisis kajian/penelaahan atas pelaksanaan peraturan yang berlaku di Kabupaten Wonogiri guna mengerucutkan muatan materi yang akan diatur dalam Raperda.
2. Tenaga Ahli agar menambahkan materi yang sudah diusulkan dalam FGD oleh OPD selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dirasa diperlukan untuk kepentingan masyarakat.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah *Public Hearing*, dilaksanakan di Kantor DPRD, dilanjutkan dengan Kegiatan Kunjungan Kerja Luar Daerah dan juga FGD II dilaksanakan di Kantor DPRD

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 14.30 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN,


WASIS PAMBUDI, S.H., M.Eng.
Pembina
NIP. 19820525 200604 1 008